



ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017-2020

Elfah Harsu Junita, Animah, Yusli Mariadi

Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: March 28, 2022
Revised: April 16, 2022
Available online: April 28, 2022

KEYWORDS

Performance, Regional Expenditure Harmony, Expenditure Growth, Effectiveness, Efficiency, Expenditure Variance Analysis

CORRESPONDENCE

Animah
E-mail: animahmtr@unram.ac.id

A B S T R A C T

This research aims to analyze the financial performance of the Mataram City Regional Development Planning Agency in 2017-2020. The benchmark in financial performance is calculated using an analysis of spending compatibility, spending growth, effectiveness, efficiency, and regional spending variance. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through documentation. The results of the study indicate that the Bappeda of Mataram City for 4 fiscal years is seen from the expenditure compatibility indicators which are considered good. Spending growth at the Mataram City Bappeda is considered to have experienced a negative decline because the average was 4%. Judging from the effectiveness analysis, the Bappeda of Mataram City is considered effective during 2017-2020 because the overall average is 96%. Looking at the efficiency of budget use, the Mataram City Bappeda is considered efficient with a total of 76%. In addition, the measurement of the analysis of the expenditure variance in the Bappeda of Mataram City during 2017-2020 can be considered good with an overall total of 96%. This shows that the Bappeda of Mataram City from 2017-2020 in terms of budget use does not exceed the value of the budget.

PENDAHULUAN

Bappeda merupakan sebuah instansi yang didirikan sesuai dengan kepentingan pembangunan dalam rangka membantu pemerintahan daerah. Sejalan dengan hal itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas beserta program-program kegiatan harus menyajikan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Untuk mengatur hal itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 terkait dengan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut pendapat Mardiasmo (2002) mengukur kinerja dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan yaitu: *satu*, membenahi kinerja instansi pemerintah. *Dua*, pendistribusian sumber daya serta pengambilan keputusan. *Ketiga*, menciptakan tanggungjawab publik serta membenahi komunikasi lembaga. Upaya pengukuran kinerja anggaran ini difungsikan sebagai bentuk menunjukkan produktivitas serta efektivitas belanja daerah yang digunakan oleh instansi.

Dalam mengukur kinerja yang dianalisis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, peneliti berpedoman pada Keputusan Dalam Negeri No. 690900327 Tahun 1996 terkait dengan Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Instansi pemerintah harus mampu menyampaikan laporan keuangan kepada pihak eksternal. Hal ini selaras dengan adanya teori *stakeholder*. Dimana pemerintah diharuskan untuk menyampaikan laporan kinerja yang berkualitas atas

penggunaan anggaran. Dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas, maka hal itu dapat bermanfaat bagi pihak *stakeholder* internal ataupun eksternal dalam mengambil sebuah keputusan (Kasali, 2005). Menurut Chariri & Ghozali (2007) sebuah instansi/organisasi bukanlah entitas yang hanya berorientasi untuk kepentingan sendiri dan mencari keuntungan semata, namun juga harus bermanfaat bagi pihak *stakeholder* lainnya. Sejalan dengan hal itu teori *stakeholder* teruss mengalami perkembangan yang dimana diawali oleh adanya perubahan dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Berdasarkan pendapat Budimanta et al (2008) ada 2 jenis dalam pendekatan *stakeholder* yakni *old corporate relation* dan *new corporate relation*. *Old corporate relation* merupakan sebuah kegiatan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam mengerjakan aktivitas operasional dimana tidak ada kesatuan dengan pihak lain. Dapat dikatakan adanya pemisah antara perusahaan dengan para *stakeholder* dan tidak ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatn bersama. Seiring dengan berjalannya waktu pendekatan tersebut tergantikan dengan konsep baru yaitu *new corporate relation*. *New corporate relation* merupakan sebuah aktivitas perusahaan tanpa memisahkan diri dengan para *stakeholder*-nya. Suatu perusahaan membangun konsep kebermanfaatn bersama sehingga muncul hubungan yang baik diantara berbagai pihak.

Teori *stakeholder* berkaitan erat dengan bagaimana upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga hubungan baik

dengan para *stakeholder lainnya*. Agar para *stakeholder* memiliki sebuah kepercayaan kepada suatu entitas, maka perusahaan perlu mempublikasikan laporan keuangan mereka kepada publik. Penelitian ini ditunjukkan untuk entitas pemerintah yang dimana harus menyajikan sebuah laporan keuangan berkualitas sehingga dapat memberikan manfaat bagi *stakeholder lainnya* dalam pengambilan suatu keputusan. Dengan adanya teori *stakeholder* ini pemerintah diwajibkan untuk menyajikan sebuah laporan kinerja serta melaksanakan kewajibannya guna tercapainya suatu kepentingan. Penyajian kinerja keuangan oleh pemerintah dapat tercerminkan dari adanya laporan keuangan. Untuk itu dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram jika dinilai mendapat kinerja yang baik dalam mengelola keuangan, maka efektivitas serta efisiensi belanjanya juga akan semakin baik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram sejauh ini belum mempunyai sistem analisis biaya yang memadai dikarenakan tidak adanya kebijakan dalam penataan tim penilai atas belanja kegiatan. Pada saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram guna melakukan perhitungan pencapaian target kinerja keuangan sudah tercermin dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terkait dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram melihat indikator kinerja keuangannya terbatas pada belanja langsung dan tidak langsung. Bastian (2001) mengemukakan bahwa kinerja merupakan kondisi tercapainya pelaksanaan kegiatan ataupun suatu program baik itu perwujudan visi, misi, tujuan ataupun sasaran sebuah organisasi. Menurut Halim & Kusufi (2007) kinerja keuangan bisa di lihat dari laporan keuangan perusahaan. Kemampuan pemerintah dalam mengatur keuangan terwujudkan dalam laporan APBD baik langsung maupun tidak.

Menurut pendapat Hamsiah (2019) ukuran kinerja keuangan pemerintah digambarkan untuk melihat kemampuan daerah dalam memandang dan mengelola sumber asli keuangan guna memenuhi kebutuhan berlangsungnya pembangunan daerah. Peneliti mengukur kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram mengacu pada Laporan Realisasi Anggaran dengan cakupan perhitungan analisis pertumbuhan belanja, efektivitas, efisiensi, keserasian serta varians belanja daerah. Peneliti menggunakan laporan tersebut karena didalamnya telah memuat informasi yang menyajikan perhitungan atas pelaksanaan dari seluruh aktivitas pembiayaan pada periode tertentu serta ada perbandingan antara realisasi dengan anggaran. Dalam laporan realisasi anggaran memuat ikhtisar sumber, alokasi, juga penggunaan sumber daya ekonomi atas penggunaan oleh instansi pemerintah dengan membandingkan tingkat anggaran dan realisasi (Sinurat, 2016). Berikut tabel laporan realisasi anggaran Bappeda Kota Mataram selama tahun 2017-2020:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram

Tahun	Anggaran	Realisasi
2017	12.019.794.348	11.756.381.351
2018	14.812.080.561	14.227.001.135
2019	13.128.504.287	12.529.293.716
2020	10.761.604.492	10.137.586.625

Sumber: Bappeda Kota Mataram (2021)

Berdasarkan tabel 1 di atas, ditarik sebuah kesimpulan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan dan penurunan anggaran. Anggaran tertinggi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram di tahun 2018 yakni senilai Rp14.812.080.561. Tahun 2018 terdapat peningkatan belanja pegawai senilai Rp9.713.687.761, belanja barang senilai Rp4.136.577.800, dan Rp961.815.000 untuk belanja modal. Anggaran tahun 2017 anggaran senilai Rp12.019.794.348 dengan jumlah belanja yang terealisasi senilai Rp11.756.381.351. Anggaran tahun 2018 senilai Rp14.812.080.561 dengan jumlah belanja yang terealisasi senilai Rp14.227.001.135. Anggaran tahun 2019 senilai Rp13.128.504.287 dengan jumlah belanja yang terealisasi senilai Rp12.529.293.716. Anggaran tahun 2020 senilai Rp10.761.604.492 dengan jumlah belanja yang terealisasi senilai Rp10.137.586.625.

Adapun penelitian yang mendukung mengenai kinerja keuangan pada sektor pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Rosidah & Riharjo (2017), Onibala et al., (2021), dan Arief (2014). Dalam Rosidah & Riharjo (2017) menyimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 termasuk dalam kriteria keuangan yang baik. Perhitungan keserasian belanja, bahwa dari lima periode tahun anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan sudah baik karena telah terfokus pada belanja langsung. Penelitian Onibala et al., (2021) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah pada daerah mengalami penurunan APBD hingga 22% selama berlangsungnya pandemi Covid-19. Ini diakibatkan karena banyak sekali program dan kegiatan yang sudah ditetapkan terpaksa ditunda oleh Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada penelitian Arief (2014) menyimpulkan bahwa ditinjau dari rasio kemandirian, efektivitas serta keserasian Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 mendapat kriteria baik. Di lihat dari perhitungan analisis variabel investasi menunjukkan pengaruh yang positif terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.

Adapun kebaharuan dalam penelitian ini yaitu: (1) perbedaan objek, (2) pada penelitian sebelumnya dari Rosidah & Riharjo (2017) dan Arief (2014) membahas terkait rasio belanja daerah serta akuntabilitas pada periode sebelum terjadinya pandemi dan penelitian dari Onibala et al., (2021) hanya membahas terkait dengan kinerja keuangan untuk dua tahun anggaran yakni pada tahun 2019 dan 2020. sedangkan penelitian ini membahas mengenai kedua-duanya yaitu kinerja keuangan ditinjau dari indikator pelaksanaan anggaran belanja untuk empat tahun anggaran yaitu tahun 2017 hingga tahun 2020. Dimana selama empat tahun anggaran akan dianalisis kinerja keuangannya dengan menggunakan perhitungan keserasian belanja, tingkat pertumbuhan, efektivitas, efisiensi, dan kriteria varians belanja daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kinerja keuangan Bappeda Kota Mataram berdasarkan formula keserasian belanja, tingkat pertumbuhan, efektivitas, efisiensi, dan varians belanja daerah dari tahun 2017-2020.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini meneliti sebuah kelompok manusia,

suatu set kondisi, pemikiran ataupun kejadian masa sekarang (Nazir, 2003). Penelitian kualitatif ini digunakan upaya meneliti sebuah objek alamiah, di mana instrumen kunci dalam penelitian yaitu peneliti sendiri (Sugiyono, 2021). Penelitian ini menggunakan sumber primer yang berupa data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan juga menggunakan data kualitatif berupa gambaran umum dan struktur instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi dengan mempelajari catatan-catatan serta dokumen. Dalam penelitian ini diuji menggunakan uji kredibilitas dengan cara perpanjangan pengamatan, menggunakan bahan referensi juga peningkatan ketekunan dalam penelitian. Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan. Perpanjangan pengamatan ini dilakukan untuk menguji kredibilitas data penelitian. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan, maka diakhirilah sebuah perpanjangan pengamatan.

Meningkatkan kecermatan dalam penelitian salah satu alat untuk mengecek apakah data yang telah dikumpulkan dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, dan tinjauan penelitian terdahulu sehingga mampu membandingkan hasil penelitian yang diperoleh. Penggunaan bahan pendukung guna membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebuah laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen sehingga mendapat sebuah kepercayaan (Sugiyono, 2021). Lokasi penelitian yaitu di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram Jl. Flamboyan No. 1 Mataram, Gedung Selatan Lantai 2 Kantor Walikota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Peneliti memilih objek penelitian pada lokasi tersebut karena berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti menemukan masalah yang sesuai dengan fokus penelitian serta diperolehnya izin untuk melakukan penelitian pada lokasi tersebut.. Peneliti menggunakan analisis model dari Miles dan Huberman dalam penelitian. Analisis data dimulai dengan mereduksi data, penyajian dan penarikan sebuah kesimpulan/verifikasi. (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Intansi Pemerintahan

Bappeda ialah suatu lembaga perencana pembangunan dipandu oleh seseorang kepala yang bertanggung pada Gubernur/ Walikota lewat sekretaris wilayah. Terikat dengan peran, lapisan organisasi, tugas, serta tata kerja Bappeda Kota Mataram sudah diatur dalam peraturan walikota Mataram No 58 Tahun 2016. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram mempunyai sebagian fungsi antara lain ialah penyelenggaraan riset dibidang pemerintahan pembangunan serta kemasyarakatan dalam rangka pengembangan pembangunan secara universal, penataan pola bawah pembangunan wilayah, penataan program tahunan wilayah, penerapan kerjasama riset serta perencanaan pembangunan

wilayah dengan lembaga akademi besar serta lembaga lain baik pemerintah ataupun swasta, pengkoordinasian, formulasi serta penataan anggaran pemasukan serta belanja wilayah, pemantauan serta penilaian, riset serta rencana pembangunan wilayah, penyelenggaraan tugas pembantuan, pengelolaan kesekretarian serta urusan rumah tangga Bappeda, dan penerapan tugas lain yang diberikan.

Kota Mataram ditetapkan menjadi pusat pemerintahan sekaligus Ibu Kota Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 Desember 1958. Sebagai ibu kota, kota Mataram terdiri atas 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Ampenan, Mataram, dan Cakranegara. Kecamatan Ampenan menjadi pusat pelabuhan, Kecamatan Mataram menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan, sedangkan Kecamatan Cakranegara sebagai pusat perdagangan dan perekonomian. Bappeda Kota Mataram mempunyai kedudukan dalam menyelesaikan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan.

Bersumber pada Peraturan Walikota Mataram No 58 Tahun 2016 Tentang Peran, Lapisan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja, hingga Bappeda selaku Perumus kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan wilayah, Pelaksana tugas sokongan dibidang perencanaan pembangunan wilayah, pemantauan, penilaian, serta pelaporan penerapan tugas sokongan teknis dibidang perencanaan pembangunan wilayah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi- fungsi penunjang urusan pemerintahan wilayah dibidang perencanaan pembangunan wilayah dan pelaksana guna lain yang diberikan oleh Walikota cocok dengan tugas serta gunanya.

Bappeda Kota Mataram dalam melaksanakan tupoksinya memiliki 2 Urusan Pemerintahan yaitu Perencana Pembangunan terdiri atas 9 program serta Urusan Statistik terdiri atas 1 program. Urusan Perencana Pembangunan terdiri atas program pelayanan administrasi perkantoran, kenaikan fasilitas serta prasarana aparatur, pengembangan informasi/ data, perencanaan pengembangan kota, perencanaan pembangunan wilayah, perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan sosial serta budaya, dan perencanaan prasarana daerah serta sumber energi alam. Sebaliknya buat Urusan Statistik terdiri atas program pengembangan informasi/ data/ statistik wilayah (Perwal Mataram Tahun 2016).

Perhitungan Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Analisis Keresasian Belanja Daerah

Analisis guna melihat keseimbangan seluruh belanja selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram. Ukuran perhitungan keresasian belanja ini terbagi atas dua analisis yakni analisis belanja langsung juga tidak langsung. Ketika belanja langsung menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan belanja tidak langsung, maka kinerja keuangan termasuk kategori baik. Begitu sebaliknya, ketika belanja langsung menunjukkan angka lebih kecil dibandingkan belanja tidak langsung, maka kinerja keuangan dari suatu organisasi bisa dikategorikan tidak baik.

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2. Rekapitulasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Mataram Tahun 2017-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
2017	12.019.794.348	11.756.381.351	3.181.037.499	8.575.343.852
2018	14.812.080.561	14.227.001.135	2.901.041.742	11.325.959.393
2019	13.128.504.287	12.529.293.716	2.863.119.796	9.666.173.920
2020	10.761.604.492	10.137.586.625	2.773.174.712	7.364.411.913

Sumber: Bappeda Kota Mataram, Diolah (2021)

Berdasarkan informasi pada rekapitulasi anggaran belanja pada Bappeda Kota Mataram Tahun 2017-2020, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 3. Belanja Langsung Terhadap Belanja Bappeda Kota Mataram Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Belanja Langsung	Belanja	(%)
2017	8.575.343.852	11.756.381.351	73%
2018	11.325.959.393	14.227.001.135	80%
2019	9.666.173.920	12.529.293.716	77%
2020	7.364.411.913	10.137.586.625	73%
Total	36.931.889.078	48.650.262.827	76%

Sumber: Bappeda Kota Mataram, Diolah (2021)

Merujuk pada tabel 3 dapat diketahui bahwa tahun anggaran 2018 terjadi peningkatan belanja langsung senilai Rp11.325.959.393 dengan persentase sebesar 80%. Tahun 2017 nilai belanja langsung terhadap belanja berada pada persentase 73% dari total belanja Rp11.756.381.351. Tahun 2019 mencapai 77% untuk perhitungan belanja langsung terhadap total belanja. Tahun 2020 mencapai angka 73% dari total belanja senilai Rp10.137.586.625.

$$Rasio\ Belanja\ Tidak\ Langsung = \frac{Total\ Belanja\ Tidak\ Langsung}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

tabel 4. Belanja Tidak Langsung Terhadap Belanja Bappeda Kota Mataram Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja	(%)
2017	3.181.037.499	11.756.381.351	27%
2018	2.901.041.742	14.227.001.135	20%
2019	2.863.119.796	12.529.293.716	23%
2020	2.773.174.712	10.137.586.625	27%
Total	11.718.373.749	48.650.262.827	24%

Sumber: Bappeda Kota Mataram, Diolah (2021)

Merujuk pada tabel 4 dapat diketahui bahwa tahun anggaran 2017 perhitungan belanja tidak langsung terhadap total belanja mencapai persentase sebesar 27% dari Rp11.756.381.351. Tahun 2018, mencapai persentase sebesar 20% dari total belanja Rp14.227.001.135. Tahun 2019, Bappeda Kota Mataram dalam penggunaan belanja tidak langsung mencapai persentase senilai 23% dari Rp12.529.293.716. Tahun 2020, Bappeda Kota Mataram dalam hal penggunaan belanja tidak langsung berada pada persentase 27% dari nilai

Rp10.137.586.625. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan Bappeda Kota Mataram dilihat dari keserasian belanja termasuk dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan selama empat periode anggaran, Bappeda Kota Mataram dilihat dari belanja langsung lebih dominan dibandingkan belanja tidak langsung.

Perhitungan Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Ukuran Pertumbuhan Belanja Daerah

Guna melihat pertumbuhan realisasi anggaran belanja dari tahun ke tahun. Formula untuk mengukur tingkat pertumbuhan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram yaitu sebagai berikut:

$$Pertumbuhan\ Belanja\ Thn = \frac{Rea.\ BelanjaThn - Rea.\ BelanjaThn - 1}{Rea.\ BelanjaThn - 1} \times 100\%$$

Tabel 5. Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2017-2020

Uraian	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Total
Realisasi Belanja	11.756.381.351	14.227.001.135	12.529.293.716	38.512.676.202
Tahun - 1 Realisasi Belanja	14.227.001.135	12.529.293.716	10.137.586.625	36.893.881.476
Kenaikan/Penurunan	2.470.619.784	(1.697.707.419)	(2.391.707.091)	(1.618.794.726)
%	21%	(12%)	(19%)	(4%)

Sumber: Bappeda Kota Mataram, Diolah (2021)

Pertumbuhan belanja Bappeda Kota Mataram selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terjadi pertumbuhan dan penurunan. Tahun 2017-2018 Bappeda Kota Mataram mengalami kenaikan belanja sebesar Rp2.470.619.784 atau sebesar 21%. Tahun 2018-2019 Bappeda Kota Mataram mengalami penurunan belanja sebesar Rp1.697.707.419 atau sebesar 12%. Tahun 2019-2020 Bappeda Kota Mataram kembali mengalami penurunan belanja sebesar Rp2.391.707.091 atau sebesar 19%. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan Bappeda Kota Mataram dilihat dari pertumbuhan belanja termasuk dalam kriteria negatif atau mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan selama empat tahun anggaran, tingkat pertumbuhan belanja Bappeda Kota Mataram lebih dominan terjadi penurunan dan total penurunan sebesar Rp1.618.794.726 dengan persentase sebesar 4% dari pagu anggaran.

Perhitungan Kinerja Keuangan Formula Efektivitas Daerah

Pengukuran kinerja keuangan dengan kriteria efektivitas telah diatur berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria efektivitas belanja adalah sebagai berikut:

- Anggaran belanja mendapat kriteria tidak efektif, jika hasil pencapaiannya kurang dari 60%
- Anggaran belanja mendapat kriteria kurang efektif, jika hasil pencapaiannya antara 60%-80%
- Anggaran belanja mendapat kriteria cukup efektif, jika hasil pencapaiannya antara 80%-90%
- Anggaran belanja mendapat kriteria efektif, jika hasil pencapaiannya antara 90%-100%
- Anggaran belanja mendapat kriteria sangat efektif, jika hasil pencapaiannya lebih dari 100%

Rumus pengukuran kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

Tabel 6. Efektivitas Belanja Bappeda Kota Mataram Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efektivitas
2017	12.019.794.348	11.756.381.351	98%	Efektif
2018	14.812.080.561	14.227.001.135	96%	Efektif
2019	13.128.504.287	12.529.293.716	95%	Efektif
2020	10.761.604.492	10.137.586.625	94%	Efektif
Total	50.721.983.688	48.650.262.827	96%	Efektif

Sumber: Bappeda Kota Mataram, Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa selama periode anggaran 2017 sampai dengan 2020 tingkat efektivitas anggaran yang ada pada instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram terus mengalami penurunan. Bappeda Kota Mataram pada tahun 2017 memperoleh tingkat efektivitas dari anggaran belanja berada pada persentase 98% yang menunjukkan angka kisaran Rp11.756.381.351 dan termasuk kategori efektif. Tahun 2018 tingkat efektivitas belanja berada pada persentase 96% pada realisasi Rp14.227.001.135 dan termasuk kategori efektif. Tahun 2019 Bappeda Kota Mataram mendapat kriteria efektif dengan tingkat persentase sebesar 95 dari angka Rp12.529.293.716. Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram memperoleh kriteria efektif dengan besaran persentase sebesar 94% dari angka Rp10.137.586.625. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram dinilai dari rasio efektivitas berada dalam kategori efektif dalam hal pelaksanaan kegiatan ataupun program.

Perhitungan Kinerja Keuangan Formula Efisiensi Daerah

Pengukuran kinerja keuangan dengan kriteria efisiensi telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria efisiensi belanja adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran belanja mendapat kriteria sangat efisien, jika mendapat hasil pencapaian kurang dari 60%
- b. Anggaran belanja mendapat kriteria efisien, jika mendapat hasil pencapaian antara 60%-80%
- c. Anggaran belanja mendapat kriteria cukup efisien, jika mendapat hasil pencapaian antara 81%-90%
- d. Anggaran belanja mendapat kriteria kurang efisien, jika mendapat hasil 91%-100%
- e. Anggaran belanja mendapat kriteria tidak efisien, jika mendapat hasil lebih dari 100%

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 7. Efisiensi Belanja Bappeda Kota Mataram Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Realisasi	Belanja Langsung	%	Tingkat Efisiensi
2017	11.756.381.351	8.575.343.852	73%	Efisien
2018	14.227.001.135	11.325.959.393	80%	Efisien
2019	12.529.293.716	9.666.173.920	77%	Efisien

2020	10.137.586.625	7.364.411.913	73%	Efisien
Total	48.650.262.827	36.931.889.078	76%	Efisien

Sumber: Bappeda Kota Mataram, Diolah (2021)

Di lihat dari tabel efisiensi belanja dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 73% atau sekitar Rp8.575.343.852 dan mendapat kriteria efisien. Tahun 2018 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 80% atau sekitar Rp11.325.959.393 dan mendapat kriteria efisien. Tahun 2019 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 77% atau sekitar Rp9.666.173.920 dan mendapat kriteria efisien. Tahun 2020 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 73% atau sekitar Rp7.364.411.913 dan mendapat kriteria efisien.

Perhitungan Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Kriteria Varians Belanja Daerah

Pengukuran kinerja dengan menggunakan analisis varians belanja digunakan untuk mengenali selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians belanja ialah analisis terhadap perbandingan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang terdapat pada tahun anggaran. Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis varians belanja} = \text{Realisasi belanja} - \text{Anggaran belanja}$$

Tabel 8. Varians Belanja Bappeda Kota Mataram Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians Belanja	%	F/U
2017	12.019.794.348	11.756.381.351	(263.412.997)	98%	F
2018	14.812.080.561	14.227.001.135	(585.079.426)	96%	F
2019	13.128.504.287	12.529.293.716	(599.210.571)	95%	F
2020	10.761.604.492	10.137.586.625	(624.017.867)	94%	F
Total	50.721.983.688	48.650.262.827	(2.071.720.861)	96%	F

Sumber: Bappeda Kota Mataram, Diolah (2021)

Berdasarkan tabel varians belanja Bappeda Kota Mataram tahun 2017 penyerapan penggunaan anggaran adalah sekitar Rp263.412.997 atau sekitar 98%, tahun 2018 penyerapan penggunaan anggaran adalah sekitar Rp585.079.426 atau sekitar 96%, tahun 2019 penyerapan penggunaan anggaran adalah sekitar Rp599.210.571 atau sekitar 94%, dan tahun 2020 penyerapan penggunaan anggaran adalah sekitar Rp624.017.867 atau sekitar 94%. Pada tahun 2017 sampai tahun 2020 terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi akan tetapi kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram mendapat kategori baik, karena dilakukannya penghematan anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram selama empat tahun anggaran dilihat dari indikator keserasian belanja termasuk dalam kategori baik. Pertumbuhan belanja Bappeda Kota Mataram dari tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan anggaran dan mengalami penurunan anggaran di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Di lihat dari rasio efektivitas belanja pada Bappeda Kota Mataram dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 termasuk dalam kriteria

efektif. Di lihat dari rasio efisiensi belanja pada Bappeda Kota Mataram dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 termasuk dalam dalam kriteria efisien. Pengukuran kinerja keuangan pada Bappeda Kota Mataram dilihat dari ukuran perhitungan varians belanja daerah termasuk dalam kriteria baik. Hal ini dikarenakan selama empat tahun anggaran, Bappeda Kota Mataram menunjukkan penggunaan realisasi belanjanya lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja dan menunjukkan bahwa adanya penghematan anggaran.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi baik secara teoritis ataupun praktis. Implikasi secara teoritis bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terpaut dengan analisis kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram. Ada pula manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat menarangkan hasil penelitian yang berguna serta bisa membagikan sumbangan pemikiran untuk pemecahan permasalahan serta mampu dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan terkait dengan analisis kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Saran yang dapat peneliti ajukan adalah diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggali lebih banyak informasi selain menggunakan metode dokumentasi juga melakukan metode wawancara dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah jumlah objek penelitian misalnya beberapa organisasi perangkat daerah di Kota Mataram agar memperkuat hasil penelitian serta melengkapi dan menggali sebanyak-banyaknya dokumen penunjang yang dibutuhkan pada penelitian.

REFERENSI

- Arief, A. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 – 2012. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(1), 63.
- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi 1. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). Teori akuntansi. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Hamsiah, A. (2019). *Manajemen keuangan daerah dalam era otonomi daerah*.
- Kasali, R. (2005). *Manajemen public relations*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia Jakarta. Bahasa Indonesia.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. 22(2), 67–89.
- Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Rosidah, N., & Riharjo, I. B. (2017). Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. 6, 1–16.
- Sinurat, M. (2016). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Pustaka Rahmat.
- Sugiyono, P. D. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif (Keempat)*. <https://doi.org/10.35308/akbis.v6i1.5236>

Alfabeta.

Perwal Mataram Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.